

LAPORAN
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2025
TRIWULAN II



KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG
2025

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----|
| HALAMAN JUDUL | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| DAFTAR TABEL | | iii |
| KATA PENGANTAR | | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | | 3 |
| BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN II | | 4 |
| 2.1 Gambaran Umum Renja PD Tahun 2025 | | 4 |
| 2.2 Evaluasi Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra PD Tahun 2025-2026, Renja Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 | | 8 |
| 2.3 Hasil Evaluasi Renja PD Tahun 2025 Triwulan II | | 14 |
| 2.4. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja, Faktor Penghambat Kinerja dan Tindak Lanjut | | 14 |
| BAB III PENUTUP | | 16 |
| 3.1 Kesimpulan | | 16 |
| 3.2 Rekomendasi | | 16 |

Lampiran Formulir Evaluasi Hasil Renja PD

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|---|
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Salaman | 6 |
| Tabel 2.2 | Evaluasi Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra PD Tahun 2025-2026, Renja Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 | 8 |

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-NYA, penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025 Triwulan II telah selesai dilaksanakan.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025 Triwulan II ini merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu dokumen ini juga disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Salaman Tahun 2025-2026.

Diperlukan komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan pihak eksternal. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025 Triwulan II ini diucapkan terima kasih.

Hasil evaluasi Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan selanjutnya di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, untuk kelancaran dan ketepatan waktu serta tercapainya target, sasaran maupun visi misi yang ditetapkan.

Salaman, Juli 2025


Kecamatan Salaman
IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM.
Pimpinan Tingkat I
NIP. 810929 200012 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2025 telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, tetapi sejauh mana Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Salaman Triwulan II Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja BAPPEDA T.A. 2023 4 Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman Tahun 2025.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan, memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Renstra dan Renja PD, RPJMD/RKPD serta merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD Perubahan dan RKPD tahun berikutnya.

Dengan adanya Evaluasi Hasil Rencana Kerja PD ini kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah kedepannya dapat makin meningkat, dan semakin baik sehingga dapat terwujud konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga nantinya akan terselenggara pembangunan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Salaman mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Salaman secara optimal.

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 TRIWULAN II

2.1. Gambaran Umum Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025, Kecamatan Salaman melaksanakan rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - b. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Salaman dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SALAMAN

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2025 | SATUAN TARGET |
|--|---|---|--|-------------------|---------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,50 | - |
| | Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan | | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) | 88,00 | - |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 100 | % |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % |
| | | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP | 100 | % |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi | 85 | % |
| | | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan | 100 | % |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan | 100 | % |

2.2. Evaluasi Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra PD Tahun 2025-2026, Renja Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025

Perbandingan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2025-2026, Renja Tahun 2025 dan APBD Kecamatan Salaman Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

TABEL 2.2.

PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENSTRA, RENJA DAN APBD TA 2025
KECAMATAN SALAMAN

| RENSTRA | RENJA | APBD |
|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|--|--|--|
| Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD | - | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja | - | - |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undang | - | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |

| | | |
|--|--|--|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| Pengadaan Mebel | - | - |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pemeliharaan Mebel | - | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | - | - |
| Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |

| | | |
|---|---|---|
| Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | - |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. | Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. | Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - |
| Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa |

| | | |
|--|--|--|
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa |
| Fasilitasi Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan | - | - |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | - |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | - |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - |

2.3 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

Total Anggaran Kecamatan Salaman Tahun 2025 sebesar Rp. 2.578.596.000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.320.741.177,- menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 51,22% dengan predikat **Rendah**. Berikut merupakan realisasi dari masing-masing program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi anggaran Rp 1.256.563.566,- atau 52% dari Pagu Anggaran dan 50% untuk realisasi indikator kinerja.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Realisasi anggaran Rp 11.297.720,- atau 35% dari Pagu Anggaran dan 50% untuk realisasi indikator kinerja.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Realisasi anggaran Rp 25.040.184,- atau 39% dari Pagu Anggaran dan 59% untuk realisasi indikator kinerja.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Realisasi anggaran Rp 8.105.762,- atau 36% dari Pagu Anggaran dan 50% untuk realisasi indikator kinerja.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Realisasi anggaran Rp 19.733.945,- atau 76% dari Pagu Anggaran dan 50% untuk realisasi indikator kinerja.

Untuk informasi lebih detail terkait dengan capaian sampai dengan kegiatan dan sub kegiatan terdapat pada lampiran form A, informasi terkait dengan rekapitulasi capaian per program terdapat pada lampiran form B, sedangkan untuk informasi terkait faktor penghambat dan pendorong tinggi rendahnya capaian terdapat pada lampiran form C.

2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja, Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Tindak Lanjut

2.4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

1. Pimpinan Organisasi memotivasi kinerja PPK, PPTK dan Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sesuai target
2. PPTK melaksanakan kegiatan berpedoman pada RKO yang telah disusun sehingga capaian fisik dan keuangan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan
3. Adanya kerjasama yang baik antar Seksi sehingga terwujud Team Work yang solid

2.4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan ataupun kendala yaitu, antara lain :

1. Secara umum tidak terdapat kendala dan hambatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan dan sesuai dengan anggaran Kas sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.
2. Penyusunan laporan masih dilakukan secara manual karena Aplikasi belum berfungsi optimal didalam pengoperasiannya yang menyebabkan layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal;

2.4.3 Tindak Lanjut

1. Koordinasi antara Bendahara dan PPTK sehingga bisa memaksimalkan penyerapan anggaran.
2. Penyempurnaan Aplikasi dan percepatan realisasi Anggaran sesuai dengan target realisasi keuangan yang telah ditetapkan.
3. Pengintegrasian aplikasi sistem Informasi yang terkait;

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan


Dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Salaman pada Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja fisik dengan predikat **Rendah** (52%) dan untuk rata-rata capaian kinerja keuangan dengan predikat **Rendah** (51%)

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil capaian kinerja Kecamatan Salaman pada Triwulan II baik fisik maupun keuangan maka untuk pelaksanaan kegiatan triwulan selanjutnya agar :

1. Dalam melaksanakan kegiatan agar berpedoman pada RKO yang telah disusun
2. Agar lebih cermat dalam penentuan target kegiatan
3. Dukungan akan ketersediaan sumber daya manusia di Perangkat Daerah
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Salaman, Juli 2025

Kecamatan Salaman

IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19810929 200012 1 001

Formulir A
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD
Renja PD Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang Tahun 2025

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan Sub Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2025) | | | | Realisasi Kinerja Pada Tiwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------------|---|-----|--|-----|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|--|----|--|---------|--|---------------|--|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100% | | 14=6+12 | | | 15=14/5 x100% | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| 1 | Meningkatnya Kinerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 2,133,615,200 | 100 | 2,106,756,392 | 100 | % | 2,147,646,000 | 25 | 570,404,053 | 25 | 552,964,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,256,563,566 | 50 | 52 | 3,595,026,410 | 152 | Kecamatan Salaman | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | 6 | dok | 3,531,200 | 6 | 3,529,868 | 6 | dok | 2,000,000 | 2 | 1,999,161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,999,161 | 50 | 100 | 9 | 5,529,029 | 150.00 | 157 | Kecamatan Salaman | |
| 1.1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | dokumen | 984,600 | 2 | 984,600 | 2 | Dokumen | 1,000,000 | 1 | 999,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999,900 | 50 | 100 | 1 | 1,884,500 | 50.00 | 202 | | | |
| 1.2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | laporan | 1,403,000 | 4 | 1,402,250 | 4 | Laporan | 1,000,000 | 1 | 999,261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 999,261 | 50 | 100 | 2 | 2,401,511 | 50.00 | 171 | | | |
| 1.3 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | laporan | 1,143,600 | 0 | 1,143,018 | 0 | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,018 | 0.00 | 100 | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan yang dikelola | | 20 | keg | 2,130,084,000 | 20 | 2,103,226,524 | 20 | keg | 2,145,646,000 | 20 | 568,404,892 | 0 | 552,964,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,121,369,616 | 75 | 52 | 40 | 3,224,596,140 | 200.00 | 151 | Kecamatan Salaman |
| 2.1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 | orang/bulan | 2,103,684,000 | 15 | 2,076,826,524 | 15 | Orang/bulan | 2,119,246,000 | 15 | 561,804,892 | 14 | 552,964,724 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,114,769,616 | 100 | 53 | 15 | 3,191,596,140 | 93.75 | 152 | | |
| 2.2 | | Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | dokumen | 26,400,000 | 12 | 26,400,000 | 12 | Dokumen | 26,400,000 | 3 | 6,600,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,600,000 | 50 | 25 | 6 | 33,000,000 | 50.00 | 125 | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepagawain Perangkat Daerah | 100 | % | | 100 | | 100 | % | | 25 | | 25 | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | 0 | 150 | | 150.00 | | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan | | 3 | layanan | 22,696,280 | 3 | 22,696,080 | 3 | layanan | 93,897,000 | 3 | 3,823,941 | 3 | 52,500,600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56,324,541 | 100 | 60 | 6 | 79,020,621 | 200.00 | 348 | | |
| 5.1 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 | laporan | 19,696,280 | 20 | 19,696,280 | 20 | Laporan | 90,897,000 | 3 | 825,000 | 2 | 52,500,600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53,325,600 | 25 | 59 | 5 | 73,021,880 | 25.00 | 371 | | |
| 5.2 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 500 | dokumen | 3,000,000 | 500 | 2,999,800 | 500 | Dokumen | 3,000,000 | 133 | 2,998,941 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2,998,941 | 88 | 100 | 338 | 5,998,741 | 67.60 | 200 | | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 2 | unit | 42,000,000 | 2 | 42,000,000 | 1 | unit | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0.00 | 100 | |
| 6.1 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | unit | 42,000,000 | 2 | 42,000,000 | 1 | unit | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0.00 | 100 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2025) | | | | | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|--|--|--|------------------------|---|-------|--|-------|------------------------|----------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|----|----|----|--|---------------|--|-----|--|-------------|--|-----|----------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x100% | | 16 |
| 7 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | layanan | 28.693,800 | 2 | 28.448,107 | 2 | layanan | 27.450,000 | 2 | 10.538,121 | 0 | 4.731,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.269,724 | 75 | 56 | 4 | 43.717,831 | 200.00 | 152 | Kecamatan Salaman |
| 7.1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | laporan | 7.450,000 | 2 | 7.449,900 | 2 | Laporan | 7.450,000 | 2 | 4.949,367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.949,367 | 100 | 66 | 2 | 12.399,267 | 100.00 | 166 | |
| 7.2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | laporan | 21.243,800 | 36 | 20.998,207 | 36 | Laporan | 20.000,000 | 9 | 5.588,754 | 9 | 4.731,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.320,357 | 50 | 52 | 18 | 31.318,564 | 50.00 | 147 | |
| 8 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 30 | unit | 138.592,095 | 30 | 138.562,265 | 30 | unit | 153.700,000.00 | 10 | 28.603,250.00 | 10 | 32.997,274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61.600,524 | 66.67 | 40 | 50 | 200,162,789 | 166.67 | 144 | Kecamatan Salaman |
| 8.1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | unit | 68.400,000 | 9 | 68.376,500 | 9 | unit | 85.000,000 | 9 | 15.290,250 | 9 | 17.416,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.706,500 | 100 | 38 | 9 | 101,083,000 | 100.00 | 148 | |
| 8.2 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | unit | 11.510,000 | 20 | 11.510,000 | 20 | Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,510,000 | 0.00 | 100 | |
| 8.3 | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | unit | 58.682,095 | 1 | 58.675,765 | 1 | Unit | 58,700,000 | 1 | 13.313,000 | 1 | 15.581,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.894,024 | 100 | 49 | 1 | 87,569,789 | 100.00 | 149 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 62 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Rendah | | | | | | | |
| 2 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 28.558,560 | | 28.558,560 | 100 | | 32.211,000 | 25 | 8.683,680 | 25 | 2.614,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.297,720 | 50 | 35 | 150 | 39,856,280 | 150.00 | 140 | |
| | | | Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP | 100 | % | 28.558,560 | 100 | 28.558,560 | 100 | % | | 25 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 | | 180 | | 180.00 | | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah dokumen yang terlayani | 2.000 | dok | 28.558,560 | 2.000 | 28.558,560 | 2000 | Dokumen | 32.211,000 | 875 | 8.683,680 | 739 | 2.614,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 11.297,720 | 81 | 35 | 3614 | 39,856,280 | 180.70 | 140 | Kecamatan Salaman |
| | | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2.000 | laporan | 28.558,560 | 2.000 | 28.558,560 | 2000 | Laporan | 32.211,000 | 875 | 8.683,680 | 739 | 2.614,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 11.297,720 | 81 | 35 | 1614 | 39,856,280 | 80.70 | 140 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | 35 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| 3 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa yang tertib administrasi | 85.00 | % | 28.400,000 | 100 | 28.399,291 | 85.00 | % | 64,882,000 | 25 | 1,145,184 | 25 | 23,895,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25,040,184 | 59 | 39 | 50 | 53,439,475 | 58.82 | 188 | |
| | | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Tertib Administrasi | 20 | desa | 8,400,000 | 20 | 8,400,000 | 20 | Lembaga Kemasyarakatan | 43,845,000 | 20 | 1,145,184 | 20 | 15,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16,815,184 | 100 | 38 | 20 | 25,215,184 | 100.00 | 300 | Kecamatan Salaman |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Jumlah Lembaga Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 5 | lembaga kemasyarakatan | 3,025,000 | 5 | 3,025,000 | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 3,500,000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 5 | 3,025,000 | 100.00 | 100 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Sub Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|--|--|------------------------|---|-----|---------------------------------|-----|------------------------|------------|----|------------|----|------------|--|----|--|----|--|------------|--|----|----------------------------|---------------|--------|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100% | | 14=6+12 | | | 15=14/5 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 | laporan | 5,375,000 | 4 | 5,375,000 | 4 | Laporan | 40,345,000 | 1 | 1,145,184 | 1 | 15,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,815,184 | 50 | 42 | 2 | 22,190,184 | 50,00 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina | 1 | lembaga kemasyarakatan | 20,000,000 | 1 | 19,999,291 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 21,037,000 | 1 | 0 | 1 | 8,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,225,000 | 100 | 39 | 2 | 28,224,291 | 200,00 | 141 | Kecamatan Salaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 | lembaga kemasyarakatan | 20,000,000 | 1 | 19,999,291 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 21,037,000 | 1 | - | 1 | 8,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,225,000 | 100 | 39 | 1 | 28,224,291 | 100,00 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 27,599,000 | 100 | 27,598,797 | 100 | % | 22,708,000 | 25 | 0 | 25 | 8,105,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,105,762 | 50 | 36 | 150 | 35,704,559 | 150,00 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan kebencanaan | 100 | % | 27,599,000 | 100 | 27,598,797 | 100 | % | | 25 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | 50,00 | 8,105,762 | 50 | 36 | 150 | 35,704,559 | 150,00 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, Keterlibatan Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan | 4 | laporan | 27,599,000 | 4 | 27,598,797 | 4 | laporan | 22,708,000 | 1 | 0 | 1 | 8,105,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,105,762 | 50 | 36 | 6 | 35,704,559 | 150,00 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 | laporan | 27,599,000 | 4 | 27,598,797 | 4 | Laporan | 22,708,000 | 1 | 0 | 1 | 8,105,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,105,762 | 50 | 36 | 2 | 35,704,559 | 50,00 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan | 100 | % | 29,439,325 | 100 | 29,437,748 | 100 | % | 26,102,000 | 25 | 14,999,945 | 25 | 4,734,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 19,733,945 | 50 | 76 | 150 | 49,171,693 | 150 | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 20 | desa | 29,439,325 | 20 | 29,437,748 | 20 | desa | 26,102,000 | 20 | 14,999,945 | 0 | 4,734,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 19,733,945 | 100 | 76 | 20 | 49,171,693 | 100,00 | 167 | Kecamatan Salaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20 | dokumen | 6,979,325 | 20 | 6,977,748 | 20 | Dokumen | 5,374,000 | 20 | 0 | 20 | 2,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 2,520,000 | 100 | 47 | 20 | 9,497,748 | 100,00 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4 | dokumen | 8,200,000 | 4 | 8,200,000 | 4 | Dokumen | 4,652,000 | 1 | 0 | 1 | 1,752,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,752,000 | 50 | 38 | 2 | 9,952,000 | 50,00 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | | |
|--|---------|--|--|--|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|----|---------|----|--|----|--|---------------|--|----------------|--|---------|----------------------------|---------------|-----|----|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100% | | 14=6+12 | | 15=14/5 x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20 | dokumen 3.000.000 | 20 | 3.000.000 | 20 | Dokumen | 1.076.000 | 20 | 0 | 20 | 462.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 462.000 | 100 | 43 | 20 | 3.462.000 | 100.00 | 115 | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 | dokumen 11.280.000 | 1 | 11.280.000 | 1 | Dokumen | 15.000.000 | 1 | 14.999.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.999.945 | 100 | 100 | 1 | 26.259.945 | 100.00 | 233 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 57 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Rendah | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 2.578.596.000 | 638.198.174 | 682.543.003 | 0 | | | | | - | 1.320.741.177 | 51 | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 51 | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Rendah | | | | | |
| Kinerja Dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: mutasi jabatan dan koordinasi yang belum maksimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1) Disisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun...
Salaman, Juli 2025

M. WISNUKUSUMA, S.STP.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19810929 200012 1 001

Dievaluasi
Kota Mungkid, 30 Juli 2025
Kepala Bappeda dan Litbangda


M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800730 199810 1 001

**EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SALAMAN
TAHUN 2025**

| KODE | URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 | REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 | | |
|---------|--|-----------------|------------------|---------------------|--|---|---------|------------------|
| | | % | PREDIKAT KINERJA | | | SPJ | % | PREDIKAT KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/5 | 9 |
| 7 | URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | |
| | rata-rata capaian program dari 2 (dua) indikator | 50 | SANGAT RENDAH | 2,432,693,000 | 1,260,510,471 | 1,256,563,566 | 52 | RENDAH |
| | Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah | 50 | SANGAT RENDAH | | | | | |
| | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah | 50 | SANGAT RENDAH | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | | | | |
| | Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP | 50 | SANGAT RENDAH | 32,211,000 | 16,526,760 | 11,297,720 | 35 | SANGAT RENDAH |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | |
| | Persentase desa yang tertib administrasi | 59 | RENDAH | 64,882,000 | 28,440,184 | 25,040,184 | 39 | SANGAT RENDAH |

| KODE | URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 | REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 | | |
|---------|---|-----------------|------------------|---------------------|--|---|---------|------------------|
| | | % | PREDIKAT KINERJA | | | SPJ | % | PREDIKAT KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/5 | 9 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | |
| | Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan Kebencanaan | 50 | SANGAT RENDAH | 22,708,000 | 17,808,000 | 8,105,762 | 36 | SANGAT RENDAH |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan | 50 | RENDAH | 26,102,000 | 23,682,000 | 19,733,945 | 76 | TINGGI |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL RATA-RATA | 52 | RENDAH | 2,578,596,000 | 1,346,967,415 | 1,320,741,177 | 51 | RENDAH |

Salaman, Juli 2025

Kabupaten Salaman

IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM.
 Kepala Desa
 810929 200012 1 001

FORM C. EVALUASI REALISASI KINERJA
Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAMAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 (satu) urusan, dengan jumlah program 5 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

- a. Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja sangat tinggi,
- b. 1 (Satu) program masuk dalam predikat kinerja tinggi,
- c. Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja sedang,
- d. 1 (Satu) program masuk dalam predikat kinerja rendah,
- e. 3 (Tiga) program masuk dalam predikat kinerja sangat rendah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang berdasarkan pagu anggaran masuk dalam predikat Rendah dengan nilai 51%. Sedangkan jika berdasarkan anggaran kas masuk dalam predikat sangat tinggi dengan nilai 98%.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

1. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas,
2. Dukungan akan ketersediaan sumber daya manusia di Perangkat Daerah Kecamatan Salaman.

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah adanya efisiensi anggaran yang belum disesuaikan dengan anggaran kas.